



## STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BANTUL

### STAKEHOLDER ANALYSIS IN HANDLING STUNTING IN BANTUL DISTRICT

Nadia Lutsiyana Puspita<sup>1</sup>, Dwi Harsono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

#### INFORMASI ARTIKEL

##### Article history:

Diterima 09-03-23

Diperbaiki 31-03-23

Disetujui 10-04-23

##### Kata Kunci:

Analisis *stakeholder*,  
Penanganan *Stunting*,  
Pengaruh dan Kepentingan

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *stakeholder* dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Identifikasi, klasifikasi, dan investasi hubungan antar *stakeholder* menjadi pembahasan dalam analisis penanganan *stunting* ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul mengalami penurunan angka masyarakat yang terjangkit melalui keterlibatan 18 *stakeholder* dari masyarakat, pemerintah, LSM, dan akademisi. *Stakeholder* dapat diklasifikasikan menjadi: 1) *Key Player*, yakni Dinas P3APPKB, Dinas Kesehatan, dan Bappeda Kabupaten Bantul; 2) *Subject*, yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dukcapil, Dinas PMK, Dinas Sosial, Dispora, Kantor Kementerian Agama, TPP P3MD, dan DLH Kabupaten Bantul; 3) *Context Setter*, yakni Tim Penggerak PKK dan LPPM STIKes AKBIDYO; dan 4) *Crowd*, yakni Kader PKK, Kader Pembangunan Manusia, TPK, dan Kader Posyandu. Berbagai *stakeholder* tersebut berhubungan dengan bentuk saling melengkapi dan bekerjasama. Meskipun, miskomunikasi dan kurangnya koordinasi seringkali menjadi permasalahan yang muncul, karena memang banyaknya *stakeholder* yang terlibat.

#### ABSTRACT

##### Keywords:

*Stakeholder analysis*,  
*Handling Stunting*, *Influence*  
*and Interest*

*This study aims to analyze stakeholders in the handling of stunting in Bantul Regency. Identification, classification, and investment in stakeholder relations are discussed in this stunting management analysis. The results showed that the handling of stunting in Bantul Regency had decreased the number of infected people through the involvement of 18 stakeholders from the community, government, NGOs, and academics. Stakeholders can be classified into: 1) Key Players, namely the P3APPKB Office, the Health Office, and the Bantul Regency Bappeda; 2) Subjects, namely the Agriculture and Food Security Office, Maritime Affairs and Fisheries Service, Dukcapil, PMK Service, Social Service, Dispora, Ministry of Religion Office, TPP P3MD, and DLH Bantul Regency; 3) Context Setter, namely the PKK Motivator Team and LPPM STIKes AKBIDYO; and 4) Crowds, namely PKK Cadres, Human Development Cadres, TPK, and Posyandu Cadres. The various stakeholders are related in complementary and cooperative forms. However, miscommunication and lack of coordination often become problems that arise, because many stakeholders are involved.*

## 1. Pendahuluan

*Stunting* merupakan sebuah kondisi pada anak dalam rentang waktu yang lama terkait permasalahan gizi kronis yang diakibatkan karena kurangnya asupan gizi yang cukup dengan kebutuhan gizi (Junaidi, Hakim, & Elmas, 2020:43). Kondisi yang memperlihatkan kurangnya asupan gizi membentuk kegagalan pada pertumbuhan anak dengan kategori usia di bawah 5 tahun. Adapun kondisi anak yang mengalami permasalahan gizi *stunting* berupa hambatan pada berbagai kehidupan, seperti perkembangan fisik, perkembangan mental anak dan terparah yakni anak akan rentan mengalami kesakitan serta dapat menyebabkan kematian.

Di Indonesia, *stunting* menjadi permasalahan serius dengan angka persentase yang tinggi. Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menyebutkan pada tahun 2019 Indonesia mencapai angka 27,67% (Izwardy, 2020). Selain itu, World Health Organization (WHO) pada tahun 2019 menyebutkan bahwa, Indonesia menempati posisi kelima dengan kasus *stunting* terbanyak di dunia.

Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dalam menurunkan angka *stunting*, salah satunya menetapkan 160 kabupaten/kota menjadi daerah prioritas penanganan *stunting* di Indonesia pada tahun 2019. Pada 160 kota tersebut diantaranya Kabupaten Bantul ditetapkan menjadi lokasi khusus (lokus) Kabupaten/Kota prioritas penanganan *stunting* tersebut.

Pada tahun 2019, berdasarkan penelitian Survei Status Gizi Indonesia (SSGBI), angka prevalensi *stunting* di Provinsi DIY menyentuh angka 21,1% (Izwardy, 2020). Prevalensi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut tergolong tinggi karena masuk ke dalam persentara 20-30%.

Namun, pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya melakukan pencegahan dan penekanan angka *stunting* pasca penunjukkan lokasi khusus tersebut. Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk tim khusus bernama Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Bantul yang terdiri dari berbagai *stakeholder*. Selain itu, berbagai konsep kegiatan telah dilaksanakan untuk menekan angka *stunting* yaitu, pencegahan lahirnya balita *stunting* yang difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan penanganan *stunting* dengan simulasi, pengasuhan, dan pendidikan berkelanjutan (Kabupaten Bantul, 2019).

Melalui berbagai kebijakan dan program diatas, angka *stunting* yang sebelumnya mengalami peningkatan, kini justru menunjukkan tren penurunan pada tahun 2020 hingga sekarang. Angka *stunting* yang sebelumnya berada pada persentase 9,74% di tahun 2020, hanya menjadi 8,36% di tahun 2021. Hal itu menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kabuputen Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan waktu penelitian mulai tanggal 1 Agustus 2022 hingga Maret 2023.

## **2.2. Subjek Penelitian**

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive*. Teknik pengambilan sampel yang berdasarkan atas pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:32). Subjek penelitian yang berpartisipasi dalam penelitian ini berbagai pihak dari pemerintah, mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Kementerian Agama Perwakilan Kabupaten Bantul, Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul, akademisi seperti STIKes AKBIDYO, termasuk kader-kader dari masyarakat yang tergabung dalam kader PKK, kader Posyandu, sampai Kader Pembangunan Manusia (KPM).

## **2.3. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapatkan dari sumber pertama dan data sekunder melalui studi literatur. Selain itu, ada empat teknik pengumpulan data dalam kajian analisis stakeholder ini untuk mendapatkan sumber-sumber data tersebut, yakni wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

Pada penelitian kualitatif, peneliti yang mengumpulkan data, baik melalui observasi, dokumentasi, hingga wawancara (Creswell, 2015:76). Namun, peneliti selaku instrumen tetap membutuhkan alat bantu dalam pengumpulan data. Berikut beberapa instrumen penunjang dalam penelitian ini:

1. Pedoman observasi berupa lembar pengamatan untuk menganalisis objek dan subjek penelitian, yakni penanganan stunting di Kabupaten Bantul.
2. Pedoman Wawancara yang dipakai dalam melakukan wawancara terhadap narasumber
3. Pedoman Dokumentasi yang digunakan untuk menunjang data penelitian berupa temuan foto maupun data yang dimiliki aktor terkait.

## **2.4. Teknik Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi sumber. Triangulasi menjadi langkah pemaduan berbagai sumber data, penelitian, teori, dan metode dalam penelitian tentang fenomena sosial tertentu (Sugiyono, 2017:42). Triangulasi sumber digunakan untuk menggali informasi dengan mempertanyakan ulang, serta mencari kebenaran masalah kepada subjek penelitian yang berbeda.

## **2.5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian *stakeholder analysis* ini, pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis MACTOR (*Matrix of Alliances and Conflict: Tactics, Objectives and Recommendations*). Metode analisis data ini menjadi alat prospektif yang dikembangkan oleh Michel Godet dengan menyempurnakan metode peramalan yang berbasis eksplorasi tradisional yang tidak mempertimbangkan efek pengganggu potensial dari para aktor yang terlibat dalam suatu sistem (Winardi, 2019). Ada enam langkah dalam analisis MACTOR, yakni sebagai berikut:

1. Mencatat rencana aktor, motivasi, kendala, dan alat mencapai tujuan
2. Mengidentifikasi isu strategis dan tujuan

3. Memposisikan aktor dan potensi konvergensi/divergensi
  4. Meranking tujuan setiap aktor
  5. Mengevaluasi tujuan kekuasaan
  6. Mengajukan pertanyaan kunci tentang masa depan (ekspektasi).
- Metode MACTOR fokus pada pergerakan aktor dan strategi.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Penanganan *stunting* menjadi program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul secara massif dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan *Stunting*, pemerintah menyadari bahwa *stunting* menjadi penyakit yang dapat terjadi pada setiap orang jika tidak diantisipasi sejak dini.

Dalam program percepatan penurunan *stunting*, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Bantul menjadi *leading sektor* dan pihak utama yang bertanggungjawab atas penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Namun, DP3APPKB tak berjalan sendiri dalam menangani problematika kesehatan masyarakat tersebut. Banyak pihak yang terlibat dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul, baik pihak yang tergolong pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat. Hal ini karena memang penanganan *stunting* menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah Kabupaten Bantul. Bahkan, pemerintah Kabupaten Bantul membentuk tim khusus bernama Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Bantul yang terdiri dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat.

Tercatat, ada 22 pihak yang tergabung dalam Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* tersebut. Mulai dari Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Bappeda Kabupaten Bantul, hingga Tim Penggerak PKK dan kader-kader dari elemen masyarakat. Bahkan, pihak akademisi seperti LPPM STIKes AKBIDYO dan Universitas Alma Atta juga tercatat bergabung dalam tim khusus yang bertujuan memprogram dan menekan angka *stunting* di Kabupaten Bantul.

Pada Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* tersebut masing-masing pihak telah dibagi tupoksi kerja dan tanggungjawabnya dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Upaya persuasif dengan edukasi, pemenuhan asupan gizi, pembentukan lingkungan yang bersih dan sehat, termasuk penanganan masyarakat yang terjangkit *stunting* menjadi berbagai program kegiatan yang dijalankan oleh Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Bantul.

#### **3.1. Identifikasi Stakeholder pada Penanganan Stunting di Kabupaten Bantul**

Identifikasi *stakeholder* perlu dilakukan, sebagai bentuk pemahaman yang jelas terkait permasalahan yang dihadapi (Reed, 2009). Pemerintah Kabupaten Bantul sampai membentuk tim khusus bernama Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Bantul yang menangani persoalan *stunting*. Tim itu terdiri dari berbagai *stakeholder* mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, praktisi hingga pelaku usaha (Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2022). Namun, bukan cuma Tim Khusus tersebut yang terlibat dalam penanganan

*stunting* di Kabupaten Bantul. Banyak juga *stakeholder* diluar TPPS Kabupaten Bantul yang melibatkan pada penyelesaian masalah *stunting*, termasuk Tim Penggerak PKK selaku LSM di Kabupaten Bantul, kader-kader PKK dan Kader Pembangunan Manusia yang menjadi bagian dari masyarakat. *Stakeholder* menjadi kelompok atau individual yang bisa memberi dampak atau terkeada dampak dari hasil tujuan tertentu (Freeman, 1984).

Pada tiap *stakeholder* mempunyai peran pada penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Pengidentifikasian stakeholder dilakukan dengan menganalisis peran, termasuk dampak atau terkena dampak dari penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Identifikasi ini diperlukan guna untuk mengenali dan memahami kepentingan dan hubungan setiap *stakeholder* (Kusumedi & HB, 2010). Berdasarkan hasil identifikasi, *stakeholder* dalam penanganan *stunting* dapat dijabarkan ke dalam 5 golongan, yaitu:

#### 1. *Stakeholder* Pemerintah Daerah

Pemerintah mengambil peran cukup besar dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Hal ini karena memang telah menjadi tugas ‘negara’ dalam memberikan pelayanan kesehatan selaku layanan mendasar, termasuk pembentukan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Mulai tahun 2021, Dinas P3APPKB memiliki peranan cukup penting dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Bantul. Hal ini karena memang penurunan *stunting* yang sebelumnya menjadi program kerja dari Dinas Kesehatan, kini mulai dialihkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selain Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul, Dalam penanggulangan *stunting*, tentu tak terlepas kaitannya dengan Dinas Kesehatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurus persoalan kesehatan bagi masyarakat.

Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul menjadi instansi pemerintah lainnya yang berperan cukup penting dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Meskipun Bappeda tidak mengintervensi program penanggulangan *stunting* secara spesifik. Namun, instansi ini merupakan penentu persoalan anggaran, infrastruktur, maupun komponen *input* yang menjadi hal krusial dalam kebijakan.

Namun, Bappeda tak hanya mempertemukan DP3APPKB dan Dinas Kesehatan saja, melainkan berbagai pihak yang memiliki peran dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Bantul. Mulai dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Berbagai *stakeholder* itu mempunyai peran dengan masing-masing programnya, meskipun hanya sekedar *stakeholder* ‘pendukung’ program penanggulangan *stunting*.

#### 2. *Stakeholder* Pemerintah Pusat

*Stunting* menjadi persoalan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang masih terus ditangani oleh berbagai hierarki pemerintah di Indonesia. Bahkan, pemerintah pusat memprioritaskan *stunting* sebagai program strategis yang perlu

mendapatkan perhatian khusus dengan penanganan yang massif terhadap problematika tersebut.

Dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul, Tim Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat terkait program-program strategis nasional yang dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk penanganan *stunting*.

Tak hanya TPP P3MD, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul juga menjadi stakeholder lain yang tergolong bagian dari pemerintah pusat yang ikut berperan dan memiliki kepentingan dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi unit terdepan dari Kementerian Agama dalam mengurus persoalan tersebut.

Kemenag mengharuskan calon pengantin untuk mendaftar 3 bulan sebelum waktu pernikahan.

“Ya tetap harus 3 Bulan, kita tidak mau jika kurang dari itu. Kalau kurang dari itu, kita minta untuk antri pada pernikahan sesudahnya (Wawancara, 15 Maret 2023).

Meskipun bukan *stakeholder* utama dalam penanganan *stunting*, Kemenag berperan cukup penting dalam upaya pembentukan keluarga yang memang siap nikah dan hamil.

### 3. Peran *Stakeholder* Lembaga Swadaya Masyarakat

Pada Kabupaten Bantul, *stakeholder* yang berperan dan berkepentingan dalam penanganan *stunting* bukan hanya pemerintah semata, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Melainkan, banyak pihak lain di luar pemerintahan yang terlibat cukup massif dan berkepentingan dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bantul menjadi LSM yang cukup massif dan memiliki peran besar dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul.

Dalam kegiatannya, Tim Penggerak PKK lebih pada turun langsung kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap Ibu Hamil dan menyusui.



Gambar 1. Pendampingan Tim Penggerak PKK terhadap Anak Batita Desa Guwosari, Kabupaten Bantul

Mereka memahami bahwasannya pendampingan dan *monitoring* secara langsung menjadi persoalan yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan orang tua yang merawat anak dibawah lima tahun. Tim Penggerak PKK menilai program-program yang langsung bersinggungan kepada masyarakat memang yang dibutuhkan dan tepat sasaran.

#### 4. Peran *Stakeholder* Akademisi

Dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul, akademisi dilibatkan pada pelaksanaan program penanganan *stunting* terutama pada bagian penyuluhan dan pemanfaatan pangan fungsional. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIKes AKBIDYO menjadi akademisi yang terlibat dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Lembaga penelitian berbasis perguruan tinggi ini berperan pada pemberian pemahaman penggunaan obat herbal pada ibu hamil dengan model penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan dari LPPM STIKes AKBIDYO berkaitan dengan penggunaan Obat, Vitamin, dan Herbal pada Ibu Hamil usia 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan kehamilan.

#### 5. *Stakeholder* yang tergolong Masyarakat

Pada era *Government* sekarang ini, masyarakat memiliki peran yang tak kalah penting dalam keberhasilan suatu program maupun kebijakan. Ada empat *stakeholder* yang tergolong pihak masyarakat dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Bantul, yakni Kader PKK Kabupaten Bantul, Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Bantul, Kader Posyandu, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kabupaten Bantul.

Kader PKK sebetulnya juga bagian dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul. Namun, *stakeholder* ini tak memiliki kewenangan dalam mengesahkan maupun membentuk program di Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul.

Para kader PKK diwadahi oleh Tim Penggerak PKK dalam satu grub *whatsapp* pada setiap kecamatannya. Setiap ada program dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul, kader-kader PKK tersebut yang pertama kali diinformasikan dan memang prioritas sasaran pesertanya. Selain itu, pengelompokan itu juga bentuk memberdayakan masyarakat dalam program yang dijalankan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul, termasuk penanganan *stunting*.

Tak hanya kader PKK, Kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga juga menjadi *stakeholder* yang tergolong bagian dari masyarakat. Kedua *stakeholder* tersebut memiliki peran yang sama dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul, yakni memberikan sosialisasi, pendataan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, Kader Posyandu dan TPK juga memiliki peran dengan memberikan pengecekan mendasar terkait kesehatan ibu dan anak pada setiap masyarakat. Bedanya, kader posyandu memberikan pelayanannya secara langsung pada Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu), sedangkan Tim Pendamping Keluarga memberikan pelayanannya justru secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat.

Bukan hanya itu, Kader Pembangunan Manusia juga menjadi salah satu model pemberdayaan dan pemobilisasian masyarakat dalam program pemerintah yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Bantul. Kader Pembangunan Manusia memastikan pemerintah desa mengadakan ‘rembug stunting’ untuk membahas program-program penanganan stunting di Desa tersebut.

Selain itu, KPM juga memantau dan *memonitoring* penanganan stunting yang dijalankan pemerintah, terutama program-program yang dijalankan pemerintah Desa. “ya itu tadi mbak melakukan monitoring, pemantauan dalam penanganan stunting (Wawancara, 8 Februari 2023). Kader masyarakat ini juga akan memaparkan hasil pemantauan terhadap program stunting yang telah dijalankan selama satu tahun dalam program rembug stunting.

### **3.2. Pengklasifikasian Stakeholder dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bantul**

Pengklasifikasian menjadi tahap selanjutnya dalam proses analisis *stakeholder*, berupa pengelompokan dan pengkategorisasian *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya untuk mengelompokkan *stakeholder* yang telah teridentifikasi (Reed, 2009:136). Tingkatan tersebut bisa dibedakan menggunakan metode skoring berdasarkan tingkat kepentingan yang terdiri dari keterlibatan, manfaat, dan harapan, serta tingkat pengaruh yang terdiri dari kontribusi, kewenangan, dan kemampuan. Berikut pengklasifikasian stakeholder dalam penanganan stunting di Kabupaten Bantul, termasuk derajat kepentingan dan pengaruhnya:

#### *1. Derajat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder*

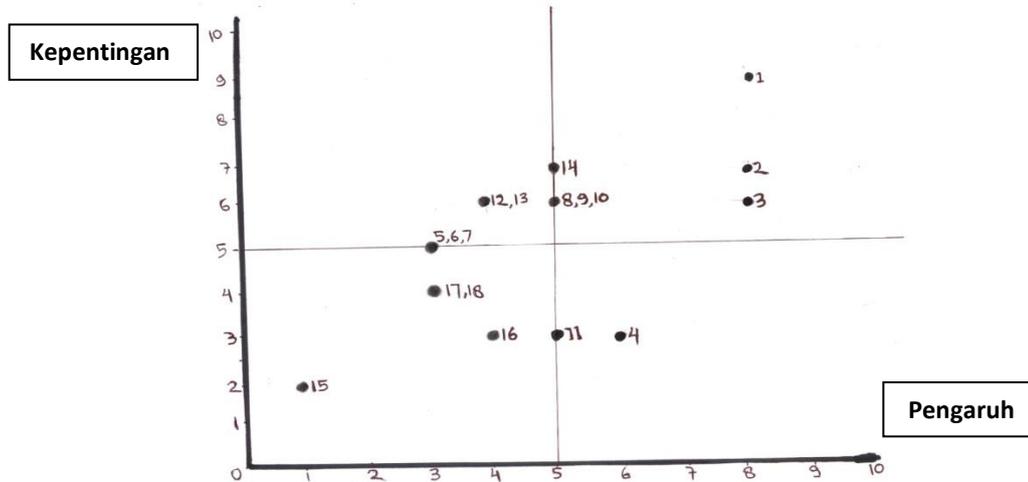
Penentuan derajat kepentingan dan pengaruh *stakeholder* menjadi bagian dari tahap pengelompokan dan pengklasifikasian. Hal ini yang menjadi landasan penentu kategori yang didasarkan pada keterlibatannya dengan bentuk skor untuk menentukan titik koordinat *stakeholder* pada matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholder*.

Setiap *stakeholder* memiliki pengukuran koordinat skor yang berbeda, karena memang tingkat kekuatan dan pengaruhnya berbeda-beda pula. Pengaruh dan kepentingan tersebut menjadi indikator utama yang digunakan untuk mempertimbangkan posisi dan peran *stakeholder* (Bryson, 2016).

Sebenarnya, penanganan *stunting* menjadi program yang utamanya dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul. Instansi daerah tersebut yang memiliki wewenang dalam pembuatan regulasi teknis pelaksanaan penanganan *stunting*, termasuk pembuatan dokumen yang berkaitan dengan *stunting*.

Namun, semenjak Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* (TPPS) dibentuk, penanganan *stunting* tak hanya menjadi tanggungjawab DP3APPKB. Melainkan, banyak *stakeholder* lain yang juga berkepentingan dan memiliki peran dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Bahkan, pihak yang terlibat bukan hanya

tergolong dari pemerintah, namun juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, hingga masyarakat umum secara langsung.



Bagan 1. Pemetaan *Stakeholder* dalam Penanganan *Stunting* di Kabupaten Bantul

Keterangan Gambar

1. Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
3. Bappeda Kabupaten Bantul
4. TP PKK Kabupaten Bantul
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6. Dinas Perikanan dan Kelautan
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas PMK Kabupaten Bantul
9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
10. Dinas Sosial Kabupaten Bantul
11. LPPM STIKes AKBIDYO
12. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. TPP P3MD
15. Kader PKK
16. Kader Pembangunan Manusia
17. Tim Pendamping Keluarga
18. Kader Posyandu

## 2. Pengelompokan *Stakeholder*

Dalam analisis penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul ini, metode pengelompokan *stakeholder* yang digunakan yaitu, *interest-influence matrices*. Hal ini karena memang analisis *stakeholder* berfokus pada dua hal, yakni kepentingan dan kekuatan untuk menggunakan sumberdaya (Crosby, 1991:2). Jenis *Interest-influence matrices*, pengelompokan *stakeholder* terbagi dalam 4 kelompok yaitu: *subject*, *key players*, *crowd*, *contest setters* (Eden & Ackermann, 1998).

### a) *Key Players*

*Stakeholder* yang tergolong dalam *Key Players* memiliki kepentingan dan kekuatan yang besar dalam suatu permasalahan (Eden & Ackermann, 1998: 122).

Dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Bantul, ada tiga *stakeholder* yang tergolong dalam kelompok ini, yakni:

- a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
- c) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul

b) *Contest Setters*

*Stakeholder* yang tergolong dalam *Context setter* menjadi *stakeholder* yang memiliki kekuatan yang besar tapi dengan kepentingan yang kecil (Eden & Ackermann, 1998: 122).

- a) Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul
- b) LPPM STIKes AKBIDYO

*Stakeholder* ini sebenarnya tak memiliki kepentingan yang cukup tinggi dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Bantul. Namun, pengaruh kedua *stakeholder* tersebut memiliki program-program yang cukup efektif dalam menanggulangi *stunting*.

c) *Subject*

*Stakeholder* yang tergolong dalam *subject* menjadi *stakeholder* yang memiliki kekuatan yang kecil tapi dengan kepentingan yang besar (Eden & Ackermann, 1998: 122). Dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Bantul, ada lima *stakeholder* yang tergolong dalam kelompok ini, yakni:

- a) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul
- b) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantul
- c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
- d) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
- e) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
- f) Dinas Sosial Kabupaten Bantul
- g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
- h) Tim Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (TPP P3MD) Kabupaten Bantul
- i) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul

Berbagai *stakeholder* diatas memiliki kepentingan yang sama dengan *stakeholder* pemerintahan yang lain dan tergabung dalam Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* (TPPS) di Kabupaten Bantul.

d) *Crowd*

*Stakeholder* yang tergolong dalam *Crowd* menjadi *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang kecil (Eden & Ackermann, 1998: 122). Dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Bantul, ada dua *stakeholder* yang tergolong dalam kelompok ini, yakni:

- a) Kader PKK Kabupaten Bantul
- b) Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kabupaten Bantul
- c) Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Bantul

d) Kader Posyandu Kabupaten Bantul

### **Penyelidikan Hubungan antar Stakeholder**

Tahapan ketiga dan terakhir dalam *stakeholders analysis* ialah menganalisis hubungan antar pihak atau *stakeholders* (Freeman, 2001). Investigasi hubungan ini digunakan untuk menentukan hubungan antar masing-masing *stakeholder*, saling mendukung atau bertentangan, maupun saling melengkapi atau bekerjasama. Ada banyak metode yang bisa dipakai pada tahap analisis hubungan antar *stakeholders* ini, diantaranya *actor-linkage matrices*, *social network analysis*, dan *knowledge mapping* (Reed et al, 2009).

Dalam penelitian penanganan *stunting* ini, metode analisis investigasi antar *stakeholder* menggunakan *actor-linkage matrices*. Berkaitan dengan jenis jalinan hubungan yang dimiliki antar stakeholder, maka jenis jalinan hubungan tersebut dibagi menjadi tiga jenis yang didasarkan pada bentuk komunikasi, koordinasi, dan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh antar *stakeholders* (Reed et al, 2009). Berikut ini bentuk hubungan dan komunikasi yang dilakukan antar *stakeholders* dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul.

### **3.3.Prinsip koordinasi antar-stakeholder**

Pada hubungan ini, beberapa *stakeholder* hanya memberikan informasi dan menyinkronkan program satu sama lain dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Pelaksanaan sinkronisasi dituangkan melalui kegiatan rencana aksi percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* yang dilaksanakan pada saat rapat koordinasi rembuk *stunting* (Farhan, 2022:17). Hal ini terlihat pada komunikasi yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul dengan *stakeholder* pemerintahan lain, termasuk stakeholder yang tergabung dalam Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Bantul.

Pada prinsip komunikasi ini, instansi pengembangan daerah tersebut hanya memberikan fasilitas satu forum untuk masing-masing *stakeholder* dapat bertemu dan memaparkan program penanganan *stunting* yang dimilikinya. Komunikasi tersebut menjadi wadah dalam pembentukan rencana bersama yang dibentuk berdasarkan masing-masing peran dalam tim yang tergabung dalam TPPS Kabupaten Bantul.

a. Prinsip pengorganisasian dan pemberdayaan

Pembentukan Tim Pembina Keluarga (TPK) dari Dinas P3APPKB, termasuk Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) dan Kader PKK Kabupaten Bantul menjadi contoh konkret pengorganisasian dan pemberdayaan menjadi model hubungan dalam penanganan *stunting*.

Kader Pembangunan Manusia dan TPK yang menjadi ‘unsur’ dari masyarakat memperlihatkan bahwasannya, pemerintah hendak melibatkan dan mengorganisasikan masyarakat dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Pemberdayaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) menjadi program percepatan penurunan *Stunting* yang membantu pemerintah dalam pencegahan *Stunting* (Sumarni, 2022:32). Bahkan, pada program-program penanggulangan *stunting* yang diselenggarakan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul, kader

PKK dilibatkan dalam pelaksanaannya, terutama ketika pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Prinsip monitoring dan evaluasi

Prinsip *evaluasi* dan *monitoring* terlihat pada pembentukan forum yang mempertemukan berbagai *stakeholder* yang diadakan oleh Bappeda Kabupaten Bantul dalam penanganan *stunting*. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, forum yang diselenggarakan oleh Bappeda juga menjadi bentuk pemaparan hasil dari program-program penanganan *stunting* sebelumnya, kemudian menjadi bentuk *evaluasi* untuk merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang baru terkait penanganan *stunting*.

Program *audit* yang diselenggarakan Dinas P3APPKB dan pemantauan *stunting* dari Tim Pendamping Keluarga maupun Kader Pembangunan Manusia (KPM) menjadi aktivitas lain yang berbentuk *evaluasi* dan *monitoring* dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Bahkan, Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul berupaya memastikan program yang dijalankan oleh *stakeholder* dari pemerintah, termasuk TPPS Kabupaten Bantul memang dijalankan oleh berbagai *stakeholder* dengan tepat sasaran, dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Berbagai bentuk komunikasi yang terjalin di atas memperlihatkan bahwasannya, berbagai *stakeholder* saling memiliki hubungan dan interaksi satu sama lain. Hubungan yang terbentuk juga bukan yang saling berlawanan, namun berbagai *stakeholder* saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Analisis hubungan berbagai *stakeholder* dalam penanganan *stunting* di atas merupakan bentuk pengelompokan yang dapat memperlihatkan hubungan antar *stakeholder*, terkait pertentangan atau saling melengkapi maupun bekerja sama satu sama lain (Salam & Noguchi, 2006).

#### 4. Kesimpulan

18 *stakeholder* dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. 18 *stakeholder* tersebut berasal dari pemerintah kabupaten (DP3APPKB, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dukcapil, Dinas PMK, Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Dispora, dan Dinas Lingkungan Hidup), pemerintah pusat (TPP P3MD dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul), Lembaga Swadaya Masyarakat (TPP PKK Kabupaten Bantul), dan masyarakat. Berbagai *stakeholder* tersebut memiliki peran dan kepentingan dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Melalui peran dan kepentingan tersebut, 18 *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya, sebagai berikut: 1) *Key Player*, Dinas P3APPKB, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan Bappeda; 2) *Subject*, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dukcapil, Dinas PMK, Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Dispora, Kantor Kementerian Agama, TPP P3MD, dan Dinas Lingkungan Hidup; 3) *Context Setter*, Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul dan

LPPM STIKes AKBIDYO; dan 4) *Crowd*, Kader PKK, Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga, dan Kader Posyandu.

Berbagai *stakeholder* tersebut juga saling berhubungan sesuai pengaruh dan kepentingannya dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Hal ini terlihat pada beragam jalinan interaksi terkait pelaksanaan peran dan program yang dijalankan oleh masing-masing *stakeholder*, baik koordinasi, pemberdayaan, termasuk evaluasi dan monitoring. Pada penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul, hubungan yang terbentuk berupa bentuk saling melengkapi dan bekerjasama sesuai peran yang dijalankan dan kepentingan masing-masing *stakeholder*.

## SARAN

Ada banyak *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Meskipun penanganan *stunting* sudah terhitung berjalan efektif dengan hubungan yang baik dan melengkapi satu sama lain. Namun, *stakeholder* akademis dan pihak swasta masih terhitung kurang terlibat dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul. Selain itu, pihak yang memberikan tekanan dan pertentangan justru terkadang diperlukan dan dihadirkan, termasuk penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul.

## Referensi

- [1] Ayu, Niken, Ni Made Sri Rahyanti (2022). “Optimalisasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Upaya Pencegahan Stunting”. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*. 7 (4). 2541-2396.
- [2] Cresswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif 7 Desain Riset : Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Edisi 3. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- [3] Crosby, B. (1991). *Stakeholder Analysis : A Vital Tool for Strategic Managers*. *U.S Agency for International Development*, 2, 1–6.
- [4] Dianto, Icol. (2018). “Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidimpuh”. *DIMAS*. 18(2).
- [5] Erwandi, Antonius. (2019). “Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang”. *Jurnal Ilmu Hukum*. 7(2).
- [6] Eden & Ackermann. (1998). *Making Strategy: The Journey of Strategic Management*. London: Sage Publications.
- [7] Farhan, Muhammad Waliyudin, Ida Widia, Elisa Susanti. (2022). “Koordinasi Dalam Upaya Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kuningan”. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, Volume 14. Nomor 1. Hal. 404-410.
- [8] Fajri, Hidayatul dkk. (2019). Analisis *Stakeholder* Dalam Konflik Revitalisasi Emplacement Stasiun Kereta Api. *Jurnal Kebijakan Publik*.10(2).
- [9] Freeman, R. Edward, Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks, Bidhan L. Parmar, dkk (2010). *Stakeholder Theory. State of the Art*. New York: Cambridge University Press
- [10] Izwardy, Doddy (2020). “Studi Status Gizi Balita Terintegrasi Susenas 2019”. *Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia*. Disampaikan pada Rakernas Jakarta, 20 Februari 2020.

- [11]Jiwandono, Rahmat (2021). Kasus Stunting di Bantul Naik, Jadi Fokus Utama Kebijakan Pemkab. Diunduh melalui *suarajogja.id* pada laman <https://jogja.suara.com/read/2021/10/15/114246/kasus-stunting-di-bantul-naik-jadi-fokus-utama-kebijakan-pemkab>
- [12]Junaidi, J., Hakim, L., & Elmas, M. S. H. (2020). Penerapan Teknologi Hidroponik Tanaman Sawi Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Stunting di Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Abdi Panca Mara*, 1(1), 1–5
- [13]Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- [14]Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Stunting
- [15]Prell, Christina, Klaus Hubacek, Mark Reed (2016). *Stakeholder Analysis and Social Network Analysis in Natural Resource Managemen*. London: Taylor and Francis Group
- [16]Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of environmental management*, 90(5), 1933-1949.